

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Dapil II Provinsi Aceh

This study aimed to determine the effect of Own-source Revenue, Profit Sharing Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures in the Government of Electoral District II Aceh. The data used in this study are reports on the realization of the APBD from 2014-2019. The data analysis method used was multiple linear regression using SPSS and three classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test). The results partially showed that Own-source Revenue and revenue sharing funds significantly influenced capital expenditures in the government of electoral districts of Aceh. Meanwhile, the Special Allocation Fund insignificantly influenced capital expenditures in the Aceh district government. Simultaneously, Own-source Revenue, Profit Sharing Funds, and Allocation Funds influenced Capital Expenditures in the two electoral governments of Aceh.

Keywords: *Own-source Revenue, Profit Sharing Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.*

Marzuki¹, Husaini², Chairil Akhyar³, Radiah Alfara⁴

^{1,2,3} Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikusaleh

Corresponding Author
marzuki@unimal.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat melalui pemberian otonomi daerah yang menitik beratkan pada pembangunan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 293 dan pasal 330 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal (Nuarisa,2013).

Artinya, pada saat penyusunan APBD, Pemerintah Daerah harus benar-benar mengalokasikan belanja modal sesuai dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal (Nuarisa,2013).

Kemajuan daerah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan pada suatu daerah dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Haryanto (2013) Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi Belanja Modal Pemerintah Daerah, sehingga kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik. Namun yang terjadi adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran Belanja Modal, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah banyak digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya yang kurang produktif.

Menurut Syukri,dkk (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Menurut Hanisya (2019) Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

KAJIAN PUSTAKA

Setiap daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat dengan begitu setiap daerah dalam melakukan pengeluaran yang mengacu pada skala prioritas, dapat mengalokasikan pada sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat. Dan dengan meningkatkan kalitas belanja pemerintah seperti belanja penyediaan infrastruktur, subsidi, dll. Menurut (Kalemi,dkk 2015) Belanja Modal adalah pengeluaran untuk aset, pembelian barang yang berlangsung dan akan digunakan selama bertahun-tahun di masa depan. Dalam kasus pemerintahan, contohnya membangun sekolah baru, pembelian softwae baru,membangun jalan dan rumah sakit, dan lain-lain. Belanja modal dapat memiliki masa yang produktif dari beberapa dekade dan membantu memberikan perekonomian yang lebih efisien

Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Nurul (2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi dimana sumber tersebut berasal dari kemampuan yang dimiliki dari daerah itu sendiri. Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan akan meningkatkan tingkat kemandirian suatu daerah dan mengurangi ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014, (Tentang Pemerintahan Daerah) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka semakin meningkat pula alokasi Belanja Modal. Jika belanja modal meningkat maka akan berdampak baik pada peningkatan pembangunan dan mutu pelayanan masyarakat. Jika aset tetap yang dimiliki daerah semakin meningkat, dapat digunakan sebagai investasi sumber dana belanja modal selanjutnya, dan juga dapat membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan otonomi daerah. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

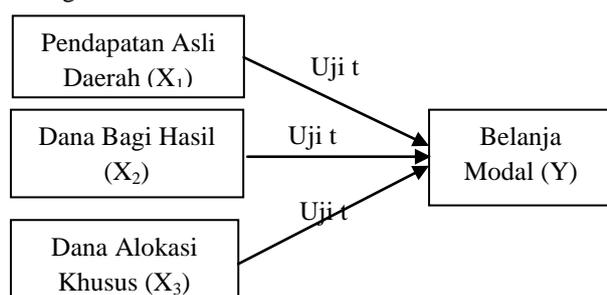
2. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil adalah salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal, adanya DBH diharapkan biaya pembangunan daerah dapat bertambah (Sholikah dan Wahyudin, 2014). DBH merupakan salah satu sumber modal dasar pemerintah daerah yang cukup potensial untuk mendapatkan dana pembangunan, jadi jika anggaran Dana Bagi Hasil meningkat maka Alokasi Belanja Modal pun meningkat.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu dana perimbangan yang digunakan sebagai sumber pendanaan terhadap anggaran belanja modal. Semakin besar Dana Alokasi Khusus maka semakin besar pula anggaran belanja modal. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di gambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis yang di ajukan pada penelitian ini adalah :

H₁ = Terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada pemerintahan Dapil II Aceh

H₂ = Terdapat pengaruh signifikan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada pemerintahan Dapil II Aceh

H₃ = Terdapat pengaruh signifikan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintahan Dapil II Aceh

H₄ = Terdapat pengaruh signifikan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintahan Dapil II Aceh

METODE PENELITIAN

Data

Lokasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan Dapil II Aceh melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPPKA) Provinsi Aceh dengan objek penelitian yaitu laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran daerah Pemerintah Dapil II Aceh pada tahun 2014-2019 tentang Belanja Modal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terdiri Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* dalam kurun waktu 5 tahun.

Sumber data ini diambil dari E-PPID BPK RI. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- Data PAD Dapil II Provinsi Aceh tahun 2014-2019
- Data Dana Bagi Hasil Dapil II Provinsi Aceh tahun 2014-2019
- Data Dana Alokasi Khusus Dapil II Provinsi Aceh tahun 2014-2019
- Data Belanja Modal Dapil II Provinsi Aceh tahun 2014-2019

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel independen / variabel bebas terhadap variabel dependen / variabel terikat. Dengan model persamaan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

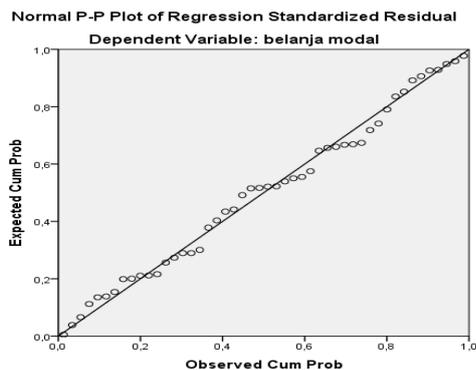
- Y = Belanja Modal
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Bagi Hasil
- X₃ = Dana Alokasi Khusus
- T = 1,2,..., T (*time series*)
- e_i = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

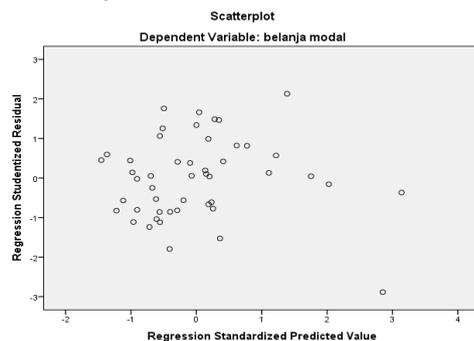
Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini penulis menguji normalitas data dilakukan dengan dua pendekatan yaitu: uji grafik *Normal probability plot (PP-Plot)* dan melakukan uji statistic non parametik yaitu uji *Kolmogorov smirnov (K-S)*.



Dari gambar disamping menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dan menunjukkan pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Untuk memengaruhi terdapatnya heteroskedastisitas, peneliti melakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).



Dari gambar disamping diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara tidak acak di atas dan di bawah garis nol, tidak terkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji regresi ini terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Dalam

penelitian ini nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,10 dimana nilai *tolerance* PAD (0,994>0,10), nilai *tolerance* DBH (0,980>0,10), dan nilai *tolerance* DAK (0,974>0,10). Dan nilai VIF lebih kecil dari 10 atau tidak ada nilai VIF diatas 10, dimana nilai VIF PAD (1,006<10), nilai VIF DBH (1,020<10), dan nilai VIF DAK (1,026<10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dan kesimpulan ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2013).

Hasil Regresi Linear Berganda

| Model | standardized Coefficients | | Beta | t | Sig. |
|------------|---------------------------|------------|------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 177952,972 | 25124,646 | | 7,083 | ,000 |
| | ,031 | ,048 | ,081 | ,647 | ,521 |
| | ,360 | ,198 | ,228 | 1,821 | ,075 |
| | ,530 | ,140 | ,476 | 3,784 | ,000 |

Dari hasil olahan SPSS maka hasil regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = 177952,972 + 0,031X_1 + 0,360X_2 + 0,530X_3 + e$$

Pada persamaan di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 177952,972 artinya jika variabel PAD, DBH dan DAK dianggap konstan, maka belanja modal nilainya sebesar 177952,972.

Koefisien regresi variabel PAD (b1) bernilai positif sebesar 0,031, artinya jika nilai variabel PAD ditingkatkan, belanja modal akan meningkat searah peningkatan PAD. Adapun koefisien regresi variabel DBH (b2) bernilai positif sebesar 0,360, artinya jika nilai variabel DBH ditingkatkan, belanja modal akan meningkat searah peningkatan DBH. Dan koefisien regresi variabel DAK (b3) bernilai positif sebesar 0,530, artinya jika nilai variabel DAK ditingkatkan, maka belanja modal akan meningkat searah peningkatan DAK.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 0,647 koefisien regresi sebesar 0,031, dan nilai probabilitas sebesar 0,521 yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, dan nilai T_{hitung} sebesar 0,647 lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 2,015 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan belanja modal dapat di terima.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dana bagi hasil dengan variabel belanja modal menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 1,821 koefisien regresi sebesar 0,360 dan nilai probabilitas sebesar 0,075 yang lebih besar dari 0,10 hal ini berarti bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif dan nilai T_{hitung} sebesar 1,821 lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,015 sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal dapat di terima.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel dana alokasi khusus dengan variabel belanja modal menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 3,874 koefisien regresi sebesar 0,530 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan dan nilai T_{hitung} sebesar 3,874 lebih besar dari T_{tabel} sebesar 2,015 sehingga dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dapat di terima.

Pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dari hasil regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar 6,947 dengan nilai signifikansi 0,001. Karena nilai signifikansi (sig) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal. Dan juga dengan melihat nilai F_{hitung} dan F_{tabel} dimana nilai F_{hitung} sebesar 6,947 lebih besar dari F_{tabel} sehingga menandakan bahwa variabel independent secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan dabil 2 aceh.
2. Dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan dabil 2 aceh.
3. Dana alokasi khusus mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintahan dabil 2 aceh.

REFERENSI

- Abdul Halim, (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Febriana, I.S & Sugeng Praptoyo. (2015). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. Jurnal ilmu dan riset akutansi. Vol. 4,No.9 (2015).
- Halim, A. dan Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Julitawati, E., Darwanis dan Jalaluddin (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal akuntansi pascasarjana uiversitas syiah kuala vol.1 no.1 hal 15-29.
- Kalemi, Vanina & Gelardina Prodani. (2015). *The Impact of Macroeconomic Factors in Public Capital Expenditure in Albania*. *European Journal of Sustainable Development*, 4 (1), 51-62.
- Mamesah, D.J., (2005). *System Administrasi Keuangan Daerah*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Nuarisa, S.A. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli daerah, dana alokasi umum dan alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*. Accounting Analysis Journal. Vol.2, No 1 (2013)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang peubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.
- Ramadhan, Muammar Khadafi, Marzuki. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Dapil II Aceh*. Unimal
- Santika Adhi Karyadi. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. Mahasiswa S1 UNY.
- Siregar, Baldric.(2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sulistiyowati, Diah.(2011). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Diponegoro*. (Dipublikasikan)
- Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2006, Tentang Pemerintah Aceh.
- Wukandari, Phareula Artha. *Pajak Daerah dalam Penedapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: 2018